



# RENCANA KERJA KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2024

**YK**  
YOGYAKARTA  
CITY



JL. KH. WAKHID HASYIM NO. 12 YOGYAKARTA  
KODE POS : 55262 TELP. (0274) 375782  
EMAIL : NG@JOGJAKARTA.GO.ID  
HOTLINE SMS : 08122780001  
HOTLINE EMAIL : UPIK@JOGJAKARTA.GO.ID  
WEBSITE : WWW.JOGJAKARTA.GO.ID

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**KEMANTREN NGAMPILAN  
KOTA YOGYAKARTA  
2023**

I.1 Kata Pengantar

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 Kemantren Ngampilan ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana program dan anggaran mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

Kami menyadari Rencana kerja Tahun 2024 Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan ini masih belum sempurna, untuk itu saran kritik masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki perencanaan Kemantren Ngampilan di masa mendatang. Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Tahun 2024 Kemantren Ngampilan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Ngampilan.

Mantri Pamong Praja Ngampilan



ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM.  
NIP. 196808221995032002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1 .....	II-5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-25
Tabel 2.2 .....	II-26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-36
Tabel 2.4 .....	II-37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1 .....	IV-2
BAB V PENUTUP .....	V-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan tetap menjaga kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik. .

Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

12. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
14. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22)

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2024.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP dan LKPJ Tahun 2024.

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

##### 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan tahun 2022 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan adalah: **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2022 adalah :

**Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 389**

**Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan tahun 2022 adalah 396.5 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Ngampilan adalah 101,92%.**

#### **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kemantren Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMANTREN Ngampilan TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	388.5	389	389	389	389	388.5	388.5	389	374	396.5	396.5

*Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2022*

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	Review	Review	Review	Review
							2018	2019	2020	2021	2022
Target	350	388.5	389	389	389	389	388.5	389	389	374	396.5
Realisasi	388.5	388.5	389	374	396.5	396.5	-	-	-	-	-

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
 Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2018	2021	2022
Target	81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	21.25	84.00	-
Realisasasi	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	84.21	-	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan  
 Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	10	11	11	12	12	-	-	-
Realisasasi	10	28.63	28.63	-	-	-	-	-	-

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
 Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	338.238.000	684.460.000	245.800.000	493.257.000	694.460.000
Realisasasi	-	-	-	493.257.000	692.230.000	722.994.000		

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
 Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	72	70
Realisasasi	-	-	-	-	70	69

Pada Tahun 2022 Kemantren Ngampilan telah merencanakan dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sabagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan

Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 5.167.756.156,- terealisasi sebesar Rp. 4.973.452.420,- atau 96,24 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghematan belanja telepon, air, listrik, dan BBM, serta untuk pajak kendaraan bermotor yang lebih rendah dari rencana anggaran.

Dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target sebesar Rp. 788.578.130,- terealisasi sebesar Rp.786.335.700 ,- atau sebesar 99,72%, hal ini karena adanya perencanaan dan persiapan yang baik sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 178.345.424,- dan terealisasi Rp. 177.601.714 atau 99,58%. Hal ini disebabkan karena belanja transport tdk digunakan sebesar yang dianggarkan, hanya sesuai kebutuhan saja.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Rp.1.998.995.028 dan terealisasi sebesar Rp.1.969.674.159 atau 98,53 % , secara fisik kegiatan terealisasi 98,53% tapi secara keuangan tdk tercapai 100% dikarenakan untuk kegiatan Jam Belajar Masyarakat di Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan kurang maksimal dengan volume dan peserta yang lebih sedikit dibanding targetnya. Dan juga untuk kegiatan fisik pemasangan kaca cembung di kelurahan Ngampilan haarga lebih rendah dari anggaran yang direncanakan, demikian pula untuk pemeliharaan PJU di kelurahan Notoprajan lebih rendah dari anggaran yang direncanakan. Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2022 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 97.22%.

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum

pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja 2022 sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN NGAMPILAN  
TAHUN 2022**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	396.5 %
---	--	---	---------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan	A	0,00	A	0,00	A	1.117.195.156,00	A	1.117.195.156,00	A	1.094.191.084,00	100%	97,03%					Mantri pamong Praja	
<b>Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.849.970,00	100%	1.849.970,00	100%	1.849.800,00	100%	99,99%						
		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022			0	Dokumen		0	Dokumen		2	Dokumen		100%	100%	100%						
		Forum OPD untuk Kesepa			0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		100%	100%	100%						

		katan Penyusun Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																		
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			0,0 0	0,0 0	8.999 .600, 00	100 ,00 %	8.999 .600, 00	10 0,0 0%	8.999 .600, 00	10 0, 00 %	10 0,0 0%							
		Penyusun RKA dan DPA 2023, RKPA dan DPPA 2022			0 Dok umen	0 Dok umen	4 Dok umen	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %								
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,0 0	0,0 0	5.999 .000, 00	100 ,00 %	5.999 .000, 00	10 0,0 0%	5.999 .000, 00	10 0, 00 %	10 0,0 0%							
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra, Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD			0 Dok umen	0 Dok umen	12 Dok umen	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %								
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Dok umen	0 Dok umen	12 Dok umen	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %								
		Pengelolaan Website OPD			0 Bul an	0 Bul an	12 Bul an	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %								
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			0,0 0	0,0 0	1.150 .000, 00	100 ,00 %	1.150 .000, 00	10 0,0 0%	1.150 .000, 00	10 0, 00 %	10 0,0 0%							
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi			0 Dok umen	0 Dok umen	12 Dok umen	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %								
	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,0 0	0,0 0	900.0 00,00	100 ,00 %	900.0 00,00	10 0,0 0%	900.0 00,00	10 0, 00 %	10 0,0 0%							
		Akuntansi dan Pelapor			0 Dok um	0 Dok um	12 Dok um	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %								

		an Keuang an		en		en		en					%							
	6	Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semester an SKPD			0,0 0		0,0 0		2.000 .000, 00	100 ,%	2.000 .000, 00	10 0,0 0%	2.000 .000, 00	10 0,0 0%						
		Lapora n Keuang an bulanan / semest eran			0 Dok um en		0 Dok um en		14 Dok um en		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
	7	Penyusun an Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,0 0		0,0 0		1.450 .000, 00	100 ,%	1.450 .000, 00	10 0,0 0%	1.450 .000, 00	10 0,0 0%						
		Lapora n progno sis realisas i anggar an			0 Dok um en		0 Dok um en		1 Dok um en		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																				
	8	Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor			0,0 0		0,0 0		9.395 .750, 00	100 ,%	9.395 .750, 00	10 0,0 0%	9.332 .600, 00	10 0,0 0%	99, 33 %					
		Kompo nen Instalasi Listrik			0 Jeni s		0 Jeni s		10 Jeni s		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
	9	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor			0,0 0		0,0 0		79.73 6.148 ,00	100 ,%	79.73 6.148 ,00	10 0,0 0%	78.26 7.327 ,00	10 0,0 0%	98, 16 %					
		Alat Tulis Kantor			0 Jeni s		0 Jeni s		45 Jeni s		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
		Bahan Komput er			0 Jeni s		0 Jeni s		9 Jeni s		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
		Bahan Peralat an dan Perleng kapan Kantor/ Rumah Tangga			0 Jeni s		0 Jeni s		40 Jeni s		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
	10	Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan			0,0 0		0,0 0		25.75 5.300 ,00	100 ,%	25.75 5.300 ,00	10 0,0 0%	25.40 5.300 ,00	10 0,0 0%	98, 64 %					
		Pengga ndaan/ Fotoco py			0 Le mb ar		0 Le mb ar		100 .00 0 Le mb ar		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
		Barang Cetaka n			0 Jeni s		0 Jeni s		9 Jeni s		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
	11	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,0 0		0,0 0		73.63 3.000 ,00	100 ,%	73.63 3.000 ,00	10 0,0 0%	73.47 7.000 ,00	10 0,0 0%	99, 79 %					
		Makana n dan Minuma n Rapat			0 Bul an		0 Bul an		12 Bul an		100 ,%		10 0,0 0%	10 0,0 0%						
		Makana n dan			0 Bul		0 Bul		12 Bul		100 ,%		10 0,0	10 0,						

		Minuman Harian Umum							%		0%		00%						
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
1	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00	0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%					
		Materai			0 Lembar	0 Lembar	350 Lembar		100,00%		10,00%		10,00%						
1	3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	0,00		66.000.000,00	100,00%	66.000.000,00	100,00%	61.354.314,00	92,96%	100,00%					
		Pembayaran Rekening Air			0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		10,00%		10,00%						
		Pembayaran Rekening Listrik			0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		10,00%		10,00%						
		Pembayaran Rekening Telephone			0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		10,00%		10,00%						
1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00	0,00		233.589.688,00	100,00%	233.589.688,00	100,00%	229.223.069,00	98,13%	100,00%					
		Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning service			0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		10,00%		10,00%						
		Operasi Adminis- trasi Perkantoran			0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		10,00%		10,00%						
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
1	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan			0,00	0,00		71.925.000,00	100,00%	71.925.000,00	100,00%	63.210.813,00	87,88%	100,00%					
		Belanja Bahan- Bahan Bakar			0 liter	0 liter	4.622 liter		100,00%		10,00%		10,00%						
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 unit	0 unit	14 unit		100,00%		10,00%		10,00%						
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2			0 unit	0 unit	12 unit		100,00%		10,00%		10,00%						
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3			0 unit	0 unit	1 unit		100,00%		10,00%		10,00%						
		Pemba			0	0	1		100		10		10						



				unit		unit		unit		,00 %		0,0 0%		0, 00 %								
		1	Pemeliharaan Pajak Kendaraan Roda 4			0,0 0		0,0 0		55.58 0.000 ,00	100 ,01 %	55.58 0.000 ,00	10 0,0 1%	55.33 0.000 ,00	10 0, 00 %	99, 55 %						
		6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 unit		0 unit		4 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan Pompa Air			0 unit		0 unit		4 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan Mesin Ketik			0 unit		0 unit		3 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan Meubel air			0 unit		0 unit		6 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan AC			0 unit		0 unit		7 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan Komputer			0 unit		0 unit		12 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan printer			0 unit		0 unit		14 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan Laptop			0 unit		0 unit		7 unit	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
		1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,0 0		0,0 0		222.3 62.00 0,00	100 ,00 %	222.3 62.00 0,00	10 0,0 0%	221.3 84.17 1,00	10 0, 00 %	99, 56 %						
			Pajak PBB			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Notoprajan			0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi	100 ,00 %		0,0 0%		0, 00 %							
			Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor kemantren Ngampilan, Kel. NT, Kel. NG dan Rumdin MPP			0 gedung		0 gedung		4 gedung	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Ruang Kamar Mandi Kepala OPD			0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							
			Ruang Pantry			0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi	100 ,00 %		0,0 0%		0, 00 %							
			Jasa Konsultan Penga			0 Paket		0 Paket		1 Paket	100 ,00 %		10 0,0 0%		10 0, 00 %							

		wasan																				
		Jasa Konsult an Perencana		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00 %		10,00 %		10,00 %								
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		0,00		244.637.000,00	100,00 %	244.637.000,00	10,00 %	242.673.090,00	10,00 %	99,20 %								
	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100,00 %		10,00 %		10,00 %									
	Jasa Keamanan Kecamatan dan Kelurahan			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100,00 %		10,00 %		10,00 %									
	Gapura Gerbang Halaman Parkir			0 Paket		0 Paket		1 Paket	100,00 %		10,00 %		10,00 %									
	Jasa Konsult an Pengawasan Tekhnis			0 Paket		0 Paket		1 Paket	100,00 %		10,00 %		10,00 %									
	Jasa Konsult an Perencanaan Tekhnis			0 Paket		0 Paket		1 Paket	100,00 %		10,00 %		10,00 %									
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																						
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		10.232.700,00	100,00 %	10.232.700,00	10,00 %	10.185.000,00	10,00 %	99,53 %								
	Belanja Modal Mebel			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100,00 %		10,00 %		10,00 %									
	Belanja Modal Alat PENDINGIN			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	100,00 %		10,00 %		10,00 %									
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>													<b>100,00 %</b>	<b>98,56 %</b>								
<b>Predikat kinerja</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>								
Tingkat perkembangan pembangunan Kemanganmpilanmeningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	84,20	0,00	84,16	0,00	84,20	788.578.130,00	84,20	788.578.130,00	84,21	786.335.700,00	100,00 %	99,72 %						Mantri Pamong Praja	

t																				
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>																			
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0,00	0,00	102.160,442,00	100,00%	102.160,442,00	100,00%	101.052,052,00	98,92%									
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		0 Orang	0 Orang	60 Orang	100,00%				10,00%										
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		0 orang	0 orang	60 orang	100,00%				10,00%										
	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan pemerintahan (Forko pimpka)		0 bulan	0 bulan	12 bulan	100,00%				10,00%										
	Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan RT/RW		0 Kali	0 Kali	4 Kali	100,00%				10,00%										
	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				10,00%										
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	100,00%				10,00%										
	Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LP MK/Kampung		0 Orang	0 Orang	30 Orang	100,00%				10,00%										
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				10,00%										
	Bimtek Musrenbang		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%				10,00%										
	Penyusunan profil kelurahan		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				10,00%										

		berbasis Data Potensi dan Pembangunan																		
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>																				
	2	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00	0,00	433.476.132,00	100,00%	433.476.132,00	100,00%	432.530.132,00	100,00%	99,78%							
		Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan	0 Kali	0 Kali	2 Kali		100,00%		10,00%		10,00%									
		Gelar Potensi UMKM	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan		100,00%		10,00%		10,00%									
		Jasa Konsultan Pengawas	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		100,00%		10,00%		10,00%									
		Jasa Konsultan Perencana	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		100,00%		10,00%		10,00%									
		Jasa Tenaga Teknis Pemandu pembinaan Perumahan masyarakat	0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%		10,00%		10,00%									
		Penataan kawasan Food Court Purwodiningrat Terintegrasi	0 Lokasi	0 Lokasi	1 Lokasi		100,00%		10,00%		10,00%									
		Penataan Kawasan Wisata Tengersur	0 Paket	0 Paket	1 Paket		100,00%		10,00%		10,00%									
		Pemanduan Kegiatan Pembangunan dan Perumahan	0 bulan	0 bulan	11 bulan		100,00%		10,00%		10,00%									
		Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		10,00%		10,00%									

		Workshop Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM)		0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%		10,00%		100,00%								
		Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan (INMEN)		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		10,00%		100,00%								
		Workshop Pedagang Kaki Lima		0 Orang	0 Orang	40 Orang	100,00%		10,00%		100,00%								
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>																			
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0,00	0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	10,00%	1.200.000,00	100,00%	10,00%						
		Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00%		10,00%		100,00%							
	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		0,00	0,00		28.221.132,00	100,00%	28.221.132,00	10,00%	28.221.132,00	100,00%	10,00%						
		Operasional PATEN		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%		10,00%		100,00%							
	5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		0,00	0,00		223.520.424,00	100,00%	223.520.424,00	10,00%	223.332.384,00	100,00%	99,92%						
		Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK)		0 Orang	0 Orang	0 Orang		100,00%		0,00%		0,00%							
		Fasilitasi Pelayanan Masyarakat		0 kali	0 kali	4 kali		100,00%		10,00%		100,00%							
		Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		0 bulan	0 bulan	10 bulan		100,00%		10,00%		100,00%							
		Gelar Pentas Budaya		0 Orang	0 Orang	170 Orang		100,00%		10,00%		100,00%							
		Monitori		0	0	0		100		0,0		0,							

		ng dan Evaluasi Penanganan Kasus Stunting		Kelurahan		Kelurahan		Kelurahan		,00 %		0%			00 %										
		Operasional Jasa Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		10,00 %			100,00 %										
		Pawai Budaya		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		10,00 %			100,00 %										
		Rakord Bidang Pemberdayaan Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		10,00 %			100,00 %										
		Sosialisasi Penanganan Stunting		0 Orang		0 Orang		80 Orang		100,00 %		10,00 %			100,00 %										
		Koordinasi dan Monitoring Program Siaga Bencana Kebakaran		0 orang		0 orang		25 orang		100,00 %		10,00 %			100,00 %										
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																			<b>100,00 %</b>	<b>99,72 %</b>					
<b>Predikat kinerja</b>																				<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Angka Swadaya Murni</b>	<b>Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan</b>	<b>684.460.000</b>	<b>0,0</b>	<b>692.230.000</b>	<b>0,0</b>	<b>684.460.000</b>	<b>1.998.995.028,00</b>	<b>684.460.000</b>	<b>1.998.995.028,00</b>	<b>72.299.940</b>	<b>1.975.612.077,00</b>	<b>106%</b>	<b>98,53%</b>					<b>Mantri Pamong Praja</b>					
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																									
	1	Pembangunan Sarana dan			0,00		0,00		463.675.500,00	99,99%	463.675.500,00	99,99%	457.131.300,00	100,00%	98,59%										

Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Jasa Konsult an Perencana	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Jasa Konsult an Pengawas	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Perbaik an tutup SAH ( Saluran Air Hujan )	0 unit	0 unit	1 unit	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pemas angan CCTV ( Close d Circuit Televisi on )	0 paket	0 paket	2 paket	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pemas angan Kaca Cembu ng	0 lokasi	0 lokasi	3 lokasi	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pembu atan Denah/ Peta RT,RW	0 unit	0 unit	7 unit	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pembu atan Papan Petunjuk arah	0 unit	0 unit	20 unit	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pembu atan Spot Foto	0 lokasi	0 lokasi	7 lokasi	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pembu atan taman Kampu ng Bakpia dan Wisata Budaya di Kampu ng Pathuk	0 ka mpung	0 ka mpung	1 ka mpung	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pemeli haarn PJU ( Pener angan Jalan Umum )	0 titik	0 titik	60 titik	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pelump uran SAL ( Saluran Air Limbah )	0 kali	0 kali	4 kali	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Pembu atan SPAH ( Siste m Pemanf aatan Air Hujan )	0 unit	0 unit	2 unit	100,00 %	10,00 %	100,00 %											
	Rehab MCK ( Mandi	0 paket	0 paket	1 paket	100,00 %	10,00 %	100,00 %											





			Hujan																		
			Pemeliharaan PJU Penerangan jalan umum	0 titik	0 titik	50 titik	100,00 %		10,00 0%												
			Jasa Konsultan Pengawasan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100,00 %		10,00 0%												
			Pemeliharaan Saluran Air Hujan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00 %		10,00 0%												
	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Notoprajan			0,00	0,00	454.492.264,00	100,00 %	454.492.264,00	10,00 0%	448.43.732,00	100,00 %	98,67 %								
			Fasilitasi Kelembagaan	0 lembaga	0 lembaga	4 lembaga	100,00 %		10,00 0%												
			Fasilitasi KTB dan Kaltana	0 kampung	0 kampung	3 kampung	100,00 %		10,00 0%												
			Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	0 kali	0 kali	4 kali	100,00 %		10,00 0%												
			Fasilitasi Pertemuan SPS PAUD	0 SPS	0 SPS	8 SPS	100,00 %		10,00 0%												
			Forkom UMKM UP2K dan Gandeng Gandeng	0 kelompok	0 kelompok	3 kelompok	100,00 %		10,00 0%												
			GKPT Tertib Lingkungan berupa kegiatan Gerakan Penjangkauan Pelopor Ketertiban ( Sosialisasi, Pendataan, Aksi, Monitoring dan Evaluasi )	0 kampung	0 kampung	2 kampung	100,00 %		10,00 0%												
			Kegiatan JBM ( Jam Belajar masyarakat ) RW	0 RW	0 RW	8 RW	100,00 %		10,00 0%												
			Operasional RT/RW/	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %		10,00 0%												

			LPMK/ Kampung Kelurahan Notoprajan										%					
			Pelatihan Bergadagra	0 orang	0 orang	20 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									
			Pelatihan Ecoprint Lanjutan	0 orang	0 orang	30 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									
			Pelatihan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan	0 orang	0 orang	40 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									
			Pelatihan Pembuatan kue dan marketing online	0 orang	0 orang	20 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	0 orang	0 orang	20 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									
			Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan (Tanaman Obat/T OGA)	0 orang	0 orang	20 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									
			Workshop Administrasi GSI (Generic System image) ,PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan Posyandu (Pelayanan kesehatan terpadu)	0 orang	0 orang	30 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									
			Workshop PIKR (pusat informasi dan konseling remaja)	0 orang	0 orang	40 orang	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0,0 00%									

		reproduksi remaja Napza pergaulan remaja																				
		Pemberian Makanan Tambahan PMT penanganan Stunting	0 anak	0 anak	39 anak	100,00%		10,00%														
		Pendaftaran Kelompok Tani	0 orang	0 orang	60 orang	100,00%		10,00%														
		Pendaftaran Posyandu RW (balita/lansia/pesbina)	0 RW	0 RW	8 RW	100,00%		10,00%														
		Pentas Kesenian Lokal Kelurahan Notoprajan	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	100,00%		10,00%														
		Rakor Lembaga Masyarakat	0 kegiatan	0 kegiatan	22 kegiatan	100,00%		10,00%														
		Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00%		10,00%														
		Fasilitasi KTB (Kampung Tangguh Bencana)	0 kampung	0 kampung	3 kampung	100,00%		10,00%														
		Pertemuan TP PKK	0 bulan	0 bulan	4 bulan	100,00%		10,00%														
		Fasilitasi Paguyuban bank sampah	0	0	4	100,00%		10,00%														
	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngampilan		0,00	0,00	353.527.264,00	99,98%	353.527.264,00	99,60%	346.747,547,00	99,62%	98,08%										
		Fasilitasi Kelembagaan	0 lembaga	0 lembaga	5 lembaga	100,00%		10,00%														
		Fasilitasi	0	0	4	100		10														

			si KTB (Kampung Tanggung Bencana)	ka mp ung	ka mp ung	ka mp ung	,00 %	0,0 0%	0, 00 %								
			Fasilita si Pelaya nan Masyar akat	0 kali	0 kali	4 kali	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Gebyar Lansia	0 ora ng	0 ora ng	30 ora ng	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Gelar Minggu Pungka san	0 kali	0 kali	5 kali	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Jam Belajar Masyar akat (JBM)	0 ka mp ung	0 ka mp ung	4 ka mp ung	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Operasi onal RT/RW/ LPMK/ Kampu ng	0 bul an	0 bul an	12 bul an	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Pelatih an Bahasa Jawa	0 ora ng	0 ora ng	20 ora ng	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Pelatih an Bergada	0 kali	0 kali	3 kali	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Pelatih an Jempari ngan	0 kali	0 kali	2 kali	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Pelatih an Pemas aran Online utk UMKM	0 ora ng	0 ora ng	30 ora ng	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Pelatih an Pembu atan Souven ir Khas Jogja	0 ora ng	0 ora ng	25 ora ng	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Pember ian PMT utk Penang anan Kasus Stuntin g	0 ana k	0 ana k	10 ana k	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Rakor dengan Lemba ga Masyar akat	0 kegi ata n	0 kegi ata n	20 kegi ata n	100 ,00 %	90, 00 %	90 ,0 0 %								
			Samba ng Kampu ng & Sapa Anak Kos	0 kali	0 kali	4 kali	100 ,00 %	10 0,0 0%	10 0, 00 %								
			Sarase han	0 ora	0 ora	30 ora	100 ,00	10 0,0	10 0,								

		dengan Penyanggung Disabilitas		ng		ng		ng		%		0%		00%						
		Tenaga Pemandu Pemberdayaan Masy. Kel.		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>														<b>99,91%</b>	<b>98,70%</b>					
<b>Predikat kinerja</b>														<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>					
<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kemantingan Ngaripalangi</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Jumlah Pelanggan Perda</b>	<b>Jumlah Pelanggan Perda</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>	<b>178.345.424,00</b>	<b>70</b>	<b>178.345.424,00</b>	<b>69</b>	<b>177.601.714,00</b>	<b>101,4%</b>	<b>99,58%</b>				<b>Mantri Pamong Praja</b>	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																				
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		126.005.424,00	100,00%	126.005.424,00	100,00%	125.261.714,00	100,00%	99,41%					
	Operasional Ketenteraman dan Ketertiban		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pelatihan Penganaman Wilayah		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
	Peningkatan Kapasitas		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

		Anggota PMI																		
		Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00 %	100,00 %	10,00 %	10,00 %											
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0 Tabung	0 Tabung	26 Tabung	100,00 %	100,00 %	10,00 %	10,00 %											
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>																				
	2	Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0,00	0,00	52.340.000,00	100,00 %	52.340.000,00	100,00 %	10,00 %	52.340.000,00	100,00 %	10,00 %							
		Operasional Ketertiban Masyarakat	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %	100,00 %	10,00 %	10,00 %											
		Operasional Pengamanan Masyarakat	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	100,00 %	100,00 %	10,00 %	10,00 %											
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>												100,00 %	99,70 %							
<b>Predikat kinerja</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>						4.083.113.738,00	4.083.113.738,00	4.033.740.575,00												
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)</b>												99,99 %	98,79 %							
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)</b>												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: -Fungsi evaluasi kegiatan berjalan lebih efektif sehingga meningkatkan pencapaian pelaksanaan kegiatan dan adanya kerjasama tim sertadukung stakeholder. - Keadaan pandemi yang sudah menurun dan dapat ditekan mendukung pelaksanaan kegiatan di masyarakat meningkat kembali																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya kesulitan pekerjaan fisik pada anggaran perubahan di lapangan terkait pelaksanaan yang semula direncanakan 30 hr ternyata pihak ketiga tidak sanggup dan meminta waktu pengerjaan 45 hari sehingga ada keterlambatan pengerjaan oleh pihak ketiga.																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk merencanakan kegiatan terutama kegiatan fisik di Kelurahan																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Meningkatkan koordinasi dalam menyusun tatakala dan lebih mengantisipasi adanya kemunduran pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai tatakala.																			
												Yogya	20	Yog	2					
												karta,	23	yak	3					
												Disusun oleh		Dievaluasi oleh						

	Kepala KEMANTREN NGAMPILAN	Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	ENDAH DWI DINYASTUTI, SE., MM. NIP. 196808221995032 002	Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 19720306199603 1004





## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kemantren Ngampilan mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Ngampilan, dalam segi SDM masih belum sesuai dari harapan karena beberapa formasi anjab yang belum terpenuhi, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Ngampilan adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Relaisasi Capaian					Proyeksi	Catatan	
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11				12	13
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Ngampilan			350	388.5	389	389	374	389	388.5	388.5	389	374	396.5	396.5	389	
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	84.21	84.40	

6	Tingkat Swadaya Masyarakat			10	11	11	12	12	-	10	28.63	28.63	-	-	-	-
7	Angka Swadaya Murni			-	-	-	338.235.000	684.460.000	245.800.000	-	-	-	493257000	692.230.000	772.994.000	-
8	Jumlah pelanggaran Perda			-	-	-	-	72	70	-	-	-	-	70	69	-

.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat**

### **Daerah**

Kinerja Kecamatan Ngampilan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah berupa koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa empat tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kemantren, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kemantren.
3. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terutama terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kemantren dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Mantri Pamong Praja namun menjadi penilaian terhadap kinerja kemantren.
6. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat pada kelompok usia produktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kemantren Ngampilan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
  - 1) Efisien: memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
  - 2) Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
  - 3) Akuntabel: dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
  - 4) Murah: biaya yang dibebarkannya adalah semurah mungkin
  - 5) Transparan: segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
  - 6) Non diskriminatif: tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.
- b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Ngampilan terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure*)

Kemantren Ngampilan telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian dilanjutkan dengan memaklumkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima

Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Ngampilan telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain : layanan informasi, pendaftaran JSS (Jogja Smart Service), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas playground di ruang tunggu pelayanan.

3) Pengelolaan hotline untuk mempermudah masyarakat Kemantren Ngampilan memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi whatsapp, berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Ngampilan. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT/RW se-Kemantren Ngampilan, sehingga ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline Kemantren. Hotline juga berfungsi jalur peningkat efisiensi tindak lanjut pengaduan dan keterbukaan informasi public.

4) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi.

## **2. Peningkatan Akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender**

Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Ngampilan sebagai salah satu amanat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan

lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin.

Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kemantren Ngampilan juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusif dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut.

Selain itu, Kemantren Ngampilan juga merintis sebuah program mitigasi cepat yang dapat diakses oleh kelompok tersebut, sehingga berbagai hal terkait akses, peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat. Kemantren Ngampilan juga mengembangkan komunikasi dan membentuk jaringan dengan berbagai organisasi Perangkat Daerah maupun lintas sektoral untuk peningkatan akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender.

### **3. Pembangunan titik ungkit perekonomian baru di wilayah**

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, Kemantren Ngampilan memberikan perhatian lebih dalam program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama pada kegiatan yang dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dengan pendampingan dalam berbagai komponennya. Salah satu implementasinya adalah dengan menyusun dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi yang diwujudkan dalam pembangunan titik ungkitan perekonomian di masing-masing kelurahan yang didukung dengan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder 5k Gandeng Gendong. Keseriusan Kemantren Ngampilan dalam menggandeng stakeholder 5K bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan secara paripurna. Pelibatan kampus dalam pemetaan potensi dan analisa akademik menjadi salah satu jalan yang ditempuh. Korporasi yang terdiri dari hotel dan restoran yang ada di wilayah juga menjadi pendukung percepatan program pemberdayaan melalui CSR nya.

Dalam pola penganggarannya, Kemantren Ngampilan telah menerapkan sistem penyelesaian satu potensi satu lokasi yang menjadi fokus dalam tematik yang diangkat dalam Musrenbang. Dalam setiap tahunnya, Musrenbang diharapkan

dapat menjadi salah satu pintu perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan penganggaran yang dinamis dan dapat secara efektif.

#### 4. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid – 19

Untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi ini Kemantren Ngampilan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi seperti menggalakkan kegiatan UMKM, lorong sayur dan pertanian. Kegiatan yang dilakukan Kemantren Ngampilan untuk menggalakkan UMKM di wilayah dengan mengadakan kegiatan gebyar UMKM yang di dalamnya mencakup kegiatan berupa bazar produk UMKM, lomba produk UMKM mulai dari makanan, pernak- pernik sampai pakaian, tas maupun sepatu. Untuk bidang pertanian kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan lomba kelompok tani yang ada di wilayah.

#### 5. Pemenuhan sarpras

Proses Pembangunan wilayah tidak bisa lepas dari pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Pembangunan menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pengukuran skala prioritas.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, diantaranya dengan melaunching Mal Pelayanan Publik di Komplek Balaikota Kota Timoho. Dengan terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren. Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Ngampilan :

#### **Perubahan Regulasi dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemantren Ngampilan**

NO	Regulasi Baru	Regulasi Lama	Hasil Produk Hukum
1.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja	Mencabut Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata	Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi



		Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta	
2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019.</li> <li>2. Tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Izin Mendirikan Bangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja, dengan kriteria reklame jenis papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung, ukuran maksimal 1 m<sup>2</sup>, dan tidak bersponsor dari produk tertentu.</li> <li>3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditandatangani oleh mantri Pamong Praja</li> <li>4. Mengajukan Hak Akses OSS untuk memverifikasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan</li> </ol>

## 6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program Kemantren Ngampilan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai

unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

#### **7. Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian**

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

#### **8. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan**

Kesetaraan dan keadilan sangat diperlukan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Perencanaan pembangunan membutuhkan semua lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi

Kemantren Ngampilan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

## **9. Keterbukaan Informasi Publik**

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik serta untuk mengontrol kebijakan pemerintah maka diperlukan adanya keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik.

Tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dilakukan dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2023 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2024. Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Ngampilan juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

**Tabel. 2.3**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kota Yogyakarta**

**KELURAHAN NGAMPILAN**

	Sumber Usulan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Keterangan	Asumsi	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1	ardi Anggota : Emanuel Ardi Prasetya, A.Md Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI A	Pelestarian budaya membutuhkan anggaran yang dipergunakan untuk aktivitas kegiatan <b>Kamus Usulan:</b> [01.19 NGAMPILAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Jemparingan ADIWNOTO dan Bergodo ADIWNOTO wilayah kampung Ngadiwinatan	Pengadaan sarana dan prasarana Jemparingan dan Bergodo	Jemparingan ADIWNOTO - Gandewa 4 buah X Rp. 450.000 = Rp. 1.800.000 - Anak Panah 4 lusin X Rp. 420.000 = Rp. 1.760.000 - Geber 8 buah X Rp. 220.000 = Rp. 1.680.000 - Bandul 10 buah X Rp. 30.000 = Rp. 300.000 - Alas Duduk 5 buah X Rp. 75.000 = Rp. 375.000 - Total = Rp. 5.915.000 Bergodo ADIWNOTO - Pengadeg 20 orang X @ Rp.1.700.000 = Rp. 34.000.000 - Trompet @ Rp. 1.000.000 - Dram (Tambur) @ Rp. 2.000.000 - Snar Dram 2 buah X @ Rp. 700.000 =Rp. 1.400.000 - Bende @ Rp. 700.000 - Dok-Dok @ Rp. 800.000 - Kecer @ Rp. 600.000 - Sepatu 20 pasang X @ Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000 - Kaos Kaki 20 pasang X @ Rp. 20.000 = Rp. 400.000 Total = Rp.45.900.000. Jemparing dan Bergodo Rp.5.915.000 + Rp. 45.900.000 = Rp.51.815.000	7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Ngampilan 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kamis, 23/02/2023 16:02		Ditelaah	
2	ardi Anggota : Emanuel Ardi Prasetya, A.Md Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI A	Anggaran pembinaan dan Pelatihan <b>Kamus Usulan:</b> [01.19 NGAMPILAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Warga Purwodiingratan Ngampilan Jemparingan Bedhor Mataram	Pelestarian Budaya Lokat	5 buah Gandewa X @ Rp.400.000 = Rp. 2.000.000 5 dos ank panah X @ Rp. 350.000 = Rp. 1.750.000 2 lembar spon X @ Rp.200.000 = Rp. Rp. 400.000 Total = Rp. 4.150.0000	7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Ngampilan 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kamis, 23/02/2023 15:34		Ditelaah	

Total data sebanyak 2, menampilkan range data dari (1 - 2)

## KELURAHAN NOTOPRAJAN

1	<p>Dhian          Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd          Fraksi : Fraksi Gerindra</p> <p>Komisi : PIMPINAN</p>	<p>Pelatihan pembuatan bakpia</p> <p>Kamus Usulan:[01.13 NGAMPILAN]          Pelatihan Boga di wilayah</p>	masyarakat	<p>Peningkatan kapasitas masyarakat membuat bakpia untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. kedepannya dapat menampung pekerja dan mengurangi pengangguran di wilayah Gendingan Notoprajan</p>	1 kali 35 orang
2	<p>Dhian          Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd          Fraksi : Fraksi Gerindra</p> <p>Komisi : PIMPINAN</p>	<p>Pelatihan pembuatan bakpia</p> <p>Kamus Usulan:[01.13 NGAMPILAN]          Pelatihan Boga di wilayah</p>	masyarakat	<p>Peningkatan kapasitas masyarakat membuat bakpia untuk menambah</p>	1 kali 35 orang

				penghasilan ekonomi keluarga. kedepannya dapat menampung pekerja dan mengurangi pengangguran di wilayah Ngampilan	
3	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra  Komisi : PIMPINAN	Pelatihan Hidroponik sayuran kelompok tani  Kamus Usulan:[01.14 NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Masyarakat	Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pertanian dengan memanfaatkan lahan kosong sempit serta menambah pemasukan masyarakat jika sudah panen kedepannya.	1 kali 35 Orang

4	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra  Komisi : PIMPINAN	Pelatihan ember tumpuk pengolahan sampah organik di wilayah  Kamus Usulan:[02.23 NGAMPILAN] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah	masyarakat	Pelatihan pengolahan sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang di buang di TPS untuk menjadi pupuk organik. di wilayah kelurahan Notoprajan	1 kali 35 orang
5	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra  Komisi : PIMPINAN	Permohonan sosialisasi permasalahan kesehatan di wilayah khususnya penanganan balita stunting Kamus Usulan:[01.01 NGAMPILAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	balita stunting di wilayah Kelurahan Notoprajan Kemantren Ngampilan	Masih adanya balita kurang gizi serta dibutuhkan informasi pemenuhan gizi terhadap balita	10-15 orang
6	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra  Komisi : PIMPINAN	Penerangan jalan kampung yang mati/ rusak  Kamus Usulan:[02.11 NGAMPILAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Masyarakat	Adanya lampu di wilayah Gendingan RW 03 sudah tidak berfungsi	6 Titik



				dengan baik, banyak yang mati dan menyebabkan berkurangnya jarak pandang di malam hari ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat saat malam hari	
7	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Pendampingan membuat proposal untuk pengajuan conblok di wilayah RW 03 Gendingan, Ngampilan Yogyakarta Kamus Usulan:[02.35 NGAMPILAN] Pemeliharaan Ringan	Jalan di wilayah RW 03 Gendingan, Ngampilan Yogyakarta	Wilayah Gendingan RW 03 Membutuhkan Perbaikan corblok	1 Paket

8	<p>Cahyo  Anggota : Cahyo Wibowo, S.T.  Fraksi : Fraksi PKS</p> <p>Komisi : KOMISI C</p>	<p>Kurangnya sarana dan prasarana warga sekitar di RT 27  Kamus Usulan:[02.03 NGAMPILAN]  Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah</p>	warga masyarakat	lokasi sempit didekat kali Winonggo	<p>membutuhkan 1 unit MCK umum beserta sarana dan prasarananya  anggaran : 80 juta</p>
9	<p>Cahyo  Anggota : Cahyo Wibowo, S.T.  Fraksi : Fraksi PKS</p> <p>Komisi : KOMISI C</p>	<p>Kebutuhan warga yang mendesak untuk mempunyai MCK umum  Kamus Usulan:[02.03 NGAMPILAN]  Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah</p>	warga	lokasi bisa dikomunikasikan dengan pengurus RT dan RW sekitar	<p>pembangunan 1 unit MCK umum beserta sarana dan prasarana  anggaran : 80 juta</p>

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arah tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 mengambil tema pembangunan daerah **“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”**. Tematik tersebut diharapkan menjadi arahan bagi Kemantren Ngampilan untuk meningkatkan ekonomi pendukung pariwisata budaya di wilayah yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan output Rencana Kerja Tahun 2024.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

#### **Tujuan:**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan empat tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Ngampilan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren.

Adapun Kemantren Ngampilan memiliki dua tujuan itu :

- 1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan**
- 2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 66,80 sedangkan target pada akhir Renstra adalah 70,20.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 351,67 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 395.

#### Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.  
Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:
  - a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#### Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Diatur pula dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
- c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

### **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Ngampilan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan

Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat

2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan

Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkembangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Tema Pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah : **“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat.** Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2024, Kemantren Ngampilan melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

- 1 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

- 01 **Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah**
- 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD
- 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 03 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 01 Pengadaan Mebel
- 02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 03 Pengadaan Aset tetap lainnya
- 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 01 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 04 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- 01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**

- 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**
  - 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
  - 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
  - 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
    - 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
    - 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - 2 Evaluasi Kelurahan
    - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngampilan)
    - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngampilan)
    - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Notoprajan)
    - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Notoprajan)
  - 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
    - 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    - 2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - 04 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**
    - 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan
    - 2 Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
    - 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
    - 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

- 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
  - 01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
    - 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
  - 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
    - 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    - 2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2024 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan untuk review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan ada pada sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2024 Kemantren Ngampilan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kemantren Ngampilan yang berisikan rencana pembangunan tahunan Kemantren Ngampilan untuk periode 1 (satu tahun). Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Ngampilan dan masyarakat. Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2024 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis ekonomi wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk kedua Kelurahan, Notoprajan dan Ngampilan Rencana dana strategis Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan digunakan untuk pembuatan bangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat serta Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya serta Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2024 Kemantren Ngampilan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan (Praja), Pelayanan perizinan dan non Perizinan (Umum), Sosial, Kemakmuran serta Keamanan.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah Rp. 7.975.406.022,00 yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2024.

Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut.

**Tabel. 4.1**  
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Ngampilan
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Ngampilan
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Ngampilan
			<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)</i>		0,00	0,00	1		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)					1	100.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.801.916.786,00							5.763.401.786,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						5.801.916.786,00							5.763.401.786,00	

1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						5.099.167.116,00						Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.091.737.116,00	Kemantren Ngampilan
							A											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.010.000,00						Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.420.000,00	Kemantren Ngampilan
							19		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			19						
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.020.000,00									2.020.000,00	Kemantren Ngampilan
				0.00	0.00		3		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			3				2.020.000,00		
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.590.000,00									-	Kemantren Ngampilan
				0.00	0.00		4		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			4						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.400.000,00									5.400.000,00	Kemantren Ngampilan
				0.00	0.00		12		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			12				5.400.000,00		

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.945.923.000,00								3.944.083.000,00	Kemantren Ngampilan
		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)</i>				12	3.945.923.000,00	<i>(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)</i>				12				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0.00	0.00		28	3.943.203.000,00	<i>(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)</i>				28			3.943.203.000,00	Kemantren Ngampilan
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>														
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0.00	0.00		12	880.000,00	<i>(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)</i>				12			880.000,00	Kemantren Ngampilan
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</i>													880.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0.00	0.00		18	1.840.000,00	<i>(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)</i>				18			-	Kemantren Ngampilan
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>														
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						180.852.607,00								180.852.607,00	Kemantren Ngampilan
		<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)</i>				12		<i>(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)</i>				12				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0.00	0.00		1	9.207.000,00	<i>(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)</i>				1			9.207.000,00	Kemantren Ngampilan
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>														
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.152.807,00								67.152.807,00	Kemantren Ngampilan

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	3		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				3	67.152.807,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						31.522.800,00						31.522.800,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	0.00	2		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				2	31.522.800,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72.970.000,00						72.970.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	0.00	106		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				106	72.970.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.544.703,00			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.544.703,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)			15		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				15		
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)			15		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				15		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.544.703,00						40.544.703,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	0.00	10		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				10	40.544.703,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						383.841.856,00			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			383.841.856,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)			3		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				3		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.000.000,00						105.000.000,00	Kemantren Ngampilan

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	36							36	105.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	0.00	36							36	278.841.856,00	Kemantren Ngampilan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)			57							57	534.994.950,00	Kemantren Ngampilan
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	0.00	15							15	93.053.000,00	Kemantren Ngampilan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	0.00	85							85	55.990.000,00	Kemantren Ngampilan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	3							3	132.160.000,00	Kemantren Ngampilan
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	0.00	3							3	253.791.950,00	Kemantren Ngampilan

2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						43.280.000,00							43.280.000,00	Kemantren Ngampilan
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin)				84.6									
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						20.300.000,00							20.300.000,00	Kemantren Ngampilan
			Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				1		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				1			
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						20.300.000,00							20.300.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0.00	0.00		3		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				3	20.300.000,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat						22.980.000,00							22.980.000,00	Kemantren Ngampilan
			Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)				12		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				12			
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						10.380.000,00							10.380.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0.00	0.00		1		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				1	10.380.000,00		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						12.600.000,00							12.600.000,00	Kemantren Ngampilan

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0.00	0.00	1		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			1	12.600.000,00	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun)			650000000	486.545.670,00			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		455.460.670,00	Kemantren Ngampilan
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)			12	123.606.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	12	123.606.000,00	Kemantren Ngampilan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0.00	0.00	6	123.606.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			3.00	123.606.000,00	Kemantren Ngampilan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen) Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)			2 3	51.172.670,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan) (Kemantren Ngampilan, Ngampilan)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	2 3	51.172.670,00	Kemantren Ngampilan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	0.00	0.00	15	42.842.500,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			15	42.842.500,00	Kemantren Ngampilan



			Kemasyarakatan)													
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0.00	0.00	3	8.330.170,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				3	8.330.170,00	8.330.170,00	Kemantren Ngampilan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%) Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)			100 122	36.205.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		100 122	36.295.000,00	36.295.000,00	Kemantren Ngampilan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0.00	0.00	15	8.670.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				15	8.760.000,00	8.760.000,00	Kemantren Ngampilan	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0.00	0.00	2	27.535.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				2	27.535.000,00	27.535.000,00	Kemantren Ngampilan	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga) Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan Kampung Hijau (Kampung)			16 7	275.562.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)		Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		16 7	244.387.000,00	244.387.000,00	Kemantren Ngampilan	

						12		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)					12			
						50		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)					50			
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)													-	Kemantren Ngampilan
		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0	0												
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0.00	0.00	30			(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)					30	41.997.000,00	41.997.000,00	Kemantren Ngampilan
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0.00	0.00	85			(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)					85	148.915.000,00	148.915.000,00	Kemantren Ngampilan
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0.00	0.00	80			(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)					80	8.505.000,00	8.505.000,00	Kemantren Ngampilan
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam													44.970.000,00	44.970.000,00	Kemantren Ngampilan

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0.00	0.00	50		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			50	44.970.000,00	
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)			66	132.844.000,00					132.844.000,00	Kemantren Ngampilan
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban (Kali)			12	132.844.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			12	132.844.000,00	Kemantren Ngampilan
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0.00	0.00	8	132.844.000,00	(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)			8	132.844.000,00	Kemantren Ngampilan
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)			100	40.080.000,00					40.080.000,00	Kemantren Ngampilan
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					40.080.000,00					40.080.000,00	Kemantren Ngampilan

			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				12		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				12		
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Keteriban Masyarakat (Lembaga)				2		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				2		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							17.200.000,00						17.200.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0.00	0.00		50		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				50	17.200.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							22.880.000,00						22.880.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0.00	0.00		12		(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)				12	22.880.000,00	
	JUMLAH							5.901.916.786,00						5.863.401.786,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KELURAHAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						970.789.368,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						970.789.368,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						970.789.368,00							0,00	Kelurahan Ngampilan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						970.789.368,00							-	Kelurahan Ngampilan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)					608.164.868,00							-	Kelurahan Ngampilan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)					362.624.500,00							-	Kelurahan Ngampilan
								970.789.368,00							-	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KELURAHAN NOTOPRAJAN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.102.699.868,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						1.102.699.868,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.102.699.868,00							0,00	Kelurahan Notoprajan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.102.699.868,00							-	Kelurahan Notoprajan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						555.081.868,00							-	Kelurahan Notoprajan
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)</i>													
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						547.618.000,00							-	Kelurahan Notoprajan
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)</i>													
<b>JUMLAH</b>								<b>1.102.699.868,00</b>							-	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, kecamatan dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Ngampilan Tahun 2024 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Ngampilan yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hasil musrenbang serta pokok – pokok pikiran legislatif.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2024